

# Pentingnya Kebijakan Ekonomi Menyeluruh

Oleh Kiki Verico

Mahasiswa doktoral, GSAPS, Waseda University, Tokyo dan Dosen FEUI

DALAM sebuah siklus ekonomi, krisis itu lumrah. Tidak ada negara yang tak pernah mengalami krisis. Ibarat manusia, tidak ada yang tak pernah jatuh sakit. Krisis harus dilihat sebagai 'momentum koreksi'. Ketika krisis, permintaan agar pemerintah melakukan intervensi menguat. Hal itu terlihat ketika dunia menghadapi depresi ekonomi di awal abad-20. Ekonom John M Keynes mengusulkan agar pemerintah melakukan intervensi melalui ekspansi fiskal dengan membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendorong pertumbuhan.

Ide Keynes mengantarkan dunia keluar dari depresi ekonomi lebih cepat daripada perkiraan. Ide itu kembali diadopsi ketika terjadi krisis keuangan global 2008. Seluruh pemerintah, dari Amerika, Uni Eropa, hingga Asia, melakukan ekspansi fiskal, *baillout policy*.

Kini ekonomi global mulai bangkit. Namun selama dunia masih berputar, masalah tak akan pernah berhenti. Di tengah membaiknya kondisi ekonomi dunia, berita kurang baik justru datang dari dalam negeri. Sebut saja soal tabung elpiji yang mudah meledak, pasokan listrik yang belum optimal, dan naiknya harga kebutuhan pokok tapi gaji tetap.

Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi untuk masalah-masalah itu, tetapi secara luas, pemerintah tetap perlu mendesain kebijakan ekonomi menyeluruh. Kebijakan yang minimal memuat empat hal: Analisis dampak, dimensi waktu dan faktor, peran teknologi, dan orientasi pasar.

Pertama, analisis dampak. Dalam jangka pendek, kurang dari setahun, kebijakan ekonomi sering terlihat tidak populis, tetapi dalam jangka menengah bisa terbukti menghasilkan manfaat yang besar. Dampak positif kebijakan ekonomi sering kali baru terlihat dalam jangka menengah lima tahun atau panjang 20 tahun. Mengingat dampak kebijakan ekonomi yang tak bisa dilihat hanya dalam jangka pendek, setiap negara harus memiliki skenario strategi ekonomi baik untuk jangka menengah dan panjang. Strategi membuat

arah pembangunan menjadi jelas, mantap, dan tak sekadar reaktif, populis, atau sempit. Skenario strategi membutuhkan analisis biaya-manfaat yang 'terukur'. *Regulatory impact assessment* (RIA) adalah salah satu metode yang bisa menjawab 'tantangan' ini. Ketika kebijakan dilengkapi analisis biaya-manfaat, dampaknya akan terukur dan potensi masalah bisa diantisipasi sejak awal. Eksekusi kebijakan hanya boleh dilakukan jika pemerintah yakin bahwa nilai manfaat lebih besar daripada biayanya.

Contohnya soal konversi minyak tanah ke tabung elpiji 3 kg. Kebijakan itu menghasilkan manfaat berupa penghematan anggaran subsidi minyak tanah sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Namun, kebijakan itu juga harus menghitung 'biaya'. Salah satu komponen biaya adalah sosialisasi dan pengawasan. Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh tabung dan kelengkapan yang sudah memenuhi standar 'aman'. Informasi yang tidak simetris antara penjual dan pembeli mewajibkan pemerintah menjalankan fungsi pengawasan sekaligus evaluasi atas konversi tersebut. Jika distribusi tidak diawasi dan pelanggaran tidak diberikan sanksi, konsumen akan mengalami eksploitasi. Memasukkan sosialisasi dan pengawasan sebagai biaya adalah penting untuk meminimalkan potensi risiko.

Kedua, dimensi waktu dan faktor. Dimensi waktu memperjelas gambaran 'sebelum dan setelah'. Contohnya adalah kebijakan ekonomi sebelum dan setelah krisis 1998. Pascakrisis, sistem pemerin-

tahan dan politik berubah drastis hingga memengaruhi kebijakan ekonomi. Kini otoritas tak hanya terpusat di Jakarta. Pergeseran wewenang dan kapasitas fiskal membuat pemerintah kabupaten dan provinsi ikut menentukan efektivitas kebijakan. Setiap kebijakan ekonomi harus menjawab tantangan dua level: pusat dan daerah. Sementara itu, dimensi faktor mengambil filosofi 'dengan dan tanpa'. Faktor biasanya dianalisis dengan mengambil contoh negara maju. Contohnya pelayanan pemerintah dengan dan tanpa 'reformasi birokrasi'. Bagaimana misalnya industri di negara maju menjadi produktif karena pemerintahnya bersih dan kebijakannya efisien mendukung pembangunan ekonomi. Bisa dibayangkan bagaimana RI tanpa reformasi birokrasi. Namun, adopsi contoh dari negara lain tetap harus dilakukan secara hati-

hati karena tidak semua hal layak diterapkan begitu saja di Indonesia.

Ketiga, peran teknologi. Pada pertengahan abad-19, Marx dan Engels yang konsisten 'mengawal' kritik terhadap industrialisasi dan kapitalisme menyebutkan produktivitas hanya bisa meningkat bila terjadi perubahan komposisi teknis dari alat produksi. Artinya, upah riil hanya bisa naik bila ada kemajuan teknologi. Upah riil merupakan indikator produktivitas. Negara yang memi-

liki inovasi teknologi industri akan memberikan upah riil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara yang tingkat teknologinya rendah. Kuatnya industri di negara maju membuat banyak teknolog dari negara berkembang 'enggan' kembali ke negara asal mereka. Mereka memilih tetap bekerja di negara maju karena industrinya ada dan keahlian mereka lebih dibutuhkan di sana. Di sisi lain, lemahnya industri lokal negara berkembang



## Awasi Perbankan, Perlukah Otoritas Jasa Keuangan?

Oleh Achmad Deni Daruri

President Director Center for Banking Crisis

MERTON pada 1968 dalam bukunya *Social Theory and Social Structure* sedang mengingatkan, "The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a false definition of the situation evoking a new behaviour which makes the original false conception come 'true'". This specious validity of the self-fulfilling prophecy perpetuates a reign of error. For the prophet will cite the actual course of events as proof that he was right from the very beginning." Krisis keuangan dunia mengubah persepsi regulator akan bentuk regulator keuangan yang paling ideal dalam menghadapi risiko keuangan dunia yang terus meningkat.

Permasalahan penting yang diakibatkan risiko keuangan dunia yang terus meningkat adalah ancaman bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja. Krisis kali ini juga menghantam Indonesia dengan munculnya kasus Bank Century. Sejauh mana bentuk ideal otoritas jasa keuangan bagi perekonomian Indonesia haruslah melalui proses penelitian yang matang. Jangan sampai pembentukan lembaga regulator keuangan hanya mengikuti misi politik tertentu tanpa dasar argumentasi ilmiah. Bahkan di negara maju seperti Inggris terjadi hal tersebut. Secara empiris, survei yang dilakukan Central Banking Publication (1999) menunjukkan dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal itu lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya (*resources*). Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kacamata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian

independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral, apabila bank sentral juga berwenang mengawasi bank, bank sentral akan memiliki kewenangan yang sedemikian besar. Dengan demikian, sangatlah urgen untuk mencari indikator-indikator ekonomi yang mendukung sistem pengawasan perbankan yang paling tepat bagi perekonomian Indonesia setelah munculnya kasus Bank Century.

Beberapa kajian literatur terakhir memperlihatkan akan pentingnya transparansi dan independensi dari lembaga pengawas perbankan. Bahkan akhir-akhir ini juga muncul argumentasi akan bentuk dari lembaga pengawas perbankan tersebut, apakah berbentuk bank sentral ataupun berbentuk lembaga pengawasan perbankan lainnya. Semenjak era 1970-an dan 1980-an, karena pada periode tersebut terjadi tingkat inflasi yang sangat tinggi, desakan bagi adanya bank sentral yang independen terus menguat dalam rangka menjaga stabilitas moneter dan stabilitas keuangan (Alessina and Summers, 1993; Posen, 1993; Rogoff, 1985; and Walsh, 2003). Pada periode tersebut pola *governance* dari lembaga pengawas perbankan kurang mendapat perhatian yang cukup serius, misalnya apakah berbentuk bank sentral ataupun lembaga terpisah lainnya. Namun dengan berlalunya waktu, perdebatan ini terus menguat, bahkan dengan terjadinya krisis pada 2008 di Amerika Serikat dan 2010 di Uni Eropa, perdebatan ini semakin menguat. Amerika Serikat yang notabene mengandalkan bank sentral ternyata juga mengalami krisis yang parah karena liberalisasi sektor keuangan membuat bank sentral kehilangan kontrol utamanya. Sementara itu Uni Eropa yang terkenal dengan sistem pengawasan melalui lembaga yang terpisah (di Indonesia sering diidentikkan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK) ternyata ketika Amerika Serikat dilanda krisis, perbankan di Uni Eropa termasuk Inggris juga terkena dampak yang serius.

Bahkan pada 2010 ini terjadi ancaman krisis dari *sovereign debt* yang tidak kalah serius dari krisis perbankan. Gubernur Bank Spanyol yang saat ini tengah menghadapi gempuran krisis ekonomi akibat penurunan *sovereign rating* jauh-jauh hari pada 20 November 2008 juga sudah menyadari peran lembaga-lembaga pengawasan perbankan. Dia mengharapkan bentuk apa pun lembaga pengawasan tersebut harus bersifat antisiklis. Dengan naiknya biaya modal akibat *sovereign rating* yang menurun, dampak krisis Eropa terhadap sistem perbankan kembali membesar.

Karena itu, pertanyaan tentang desain dari lembaga pengawas perbankan terus menjadi pertanyaan sentral ketika *systemic risk* terus menghantui perekonomian dunia. Ben Bernanke (Maret 2009) dalam wawancara dengan CBS mengungkapkan kekesalannya terhadap AIG yang mendapatkan *baillout* akibat sistem pengawasan lembaga keuangan yang tidak becus. Perbedaan antara era depresi 1930-an, era setelah Perang Dunia II, dan kondisi beberapa dekade terakhir adalah pada konteks penghapusan restriksi tingkat suku bunga dan portofolio. Dengan liberalisasi tersebut, sistem perekonomian modern mulai menggantikan diri kepada regulasi yang *prudent* dan pengawasan perbankan.

Dengan kata lain, metode pengawasan perbankan bergerak dari kontrol tingkat suku bunga dan *reserve requirement* menuju peraturan kecukupan modal dan pengawasan yang lebih canggih. Namun, ironisnya hingga saat ini pemikiran penguatan pengawasan perbankan khususnya oleh Basel II masih terputuk kepada persyaratan kecukupan modal. Padahal untuk menjalankan persyaratan kecukupan modal sekalipun tetap diperlukan pengawasan. Belum lagi membarikan model pengawasan yang bebas dari intervensi kelompok politik dan/atau kelompok lainnya seperti kelompok bisnis, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga multilateral. Ancaman seperti ini bukan hanya akan dialami lembaga

membuat banyak insinyur lokal bekerja tidak sesuai dengan bidang mereka.

Pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi industri pengolahan. Selain sebagai kunci keberhasilan transformasi ekonomi, pada hakikatnya, persaingan bukan terjadi secara vertikal antara alat produksi dan pekerja, tetapi secara horizontal antara alat produksi satu negara dan alat produksi negara lain (229 *New Left Review*, 1950-1998). Bila inovasi alat produksi dan proses industrialisasi berjalan baik, tak perlu 'disuruh', anak bangsa yang menguasai iptek akan kembali ke Tanah Air dan para insinyur lokal akan kembali bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Tingginya daya saing industri lokal di pasar global akan membawa dampak positif pada (1) pasar saham. Indeks harga saham industri akan naik karena naiknya permintaan saham industri lokal. Pasar saham RI akan semakin menarik dan IHSG menguat. (2) Permintaan tenaga kerja naik karena kebutuhan industri meningkat. Naiknya permintaan pekerja industri dan masuknya investasi alat pertanian akan mengurangi kelebihan pekerja di sektor pertanian, meningkatkan produktivitas per petani dan tentu saja mengurangi pengangguran. Namun, penting diingat bahwa pengembangan industri dan teknologi membutuhkan pasokan energi yang stabil, termasuk suplai listrik.

Keempat, orientasi pasar. Hubungan industri dan perdagangan harus digeser dari orientasi suplai, sebatas 'mampu membuat' ke orientasi permintaan yaitu 'mampu menjual'. Pengusaha RI harus mampu membaca arah pasar dunia dengan belajar misalnya dari Korea dan Taiwan. Kedua negara itu berhasil menjadi pesaing ekspor Jepang di akhir 1980-an. Kini, RRC pun terlihat melakukan pola serupa dengan mengembangkan industri pesaing bagi Jepang, Korea, dan Taiwan.

Orientasi pasar ekspor penting karena (1) pasar yang luas dan berat berada di luar RI. Bila sudah terlatih di pasar global, bersaing di pasar domestik bukan hal yang sulit. (2) Pendetapannya dalam mata uang asing. Selain menambah devisa, masuknya mata uang asing akan memperkuat nilai tukar rupiah. Ketika surplus devisa dirasakan 'terlalu' memperkuat rupiah, kita tak perlu khawatir karena itu artinya RI siap 'transformasi' dari penerima investasi menjadi pemberi investasi. Belakangan, pola seperti ini juga terlihat di RRC. Selain ekspor, kita tidak boleh melupakan pasar domestik karena permintaan domestik mampu mengurangi 'guncangan' eksternal dari krisis global.

Pada dasarnya, kebijakan ekonomi menyeluruh bertujuan melindungi konsumen, meningkatkan produktivitas produsen dan pekerja, dan menyejahterakan rakyat. Semoga pemerintah mampu mewujudkan tujuan-tujuan ini.

### PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: [opini@mediaindonesia.com](mailto:opini@mediaindonesia.com) atau [opinimidi@yahoo.com](mailto:opinimidi@yahoo.com) atau fax: (021) 5812105 (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).

**MI MEDIA INDONESIA**

**Penyunting:** Drs. H. Teuku Yousif Syah MSI (AIM)  
**Direktur Utama:** Rahni Lowihur-Schad  
**Direktur Perencanaan:** Saur M. Hutabarat  
**Dewan Redaksi Media Group:** Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadid Sudrajat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowihur Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryoprato, Toeti Adhitama  
**Redaktur Senior:** Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat  
**Kepala Divisi Pemberitaan:** Usman Kansong  
**Deputi Kepala Divisi Pemberitaan:** Kleden Suban  
**Kepala Divisi Content Enrichment:** Gaudensius Suhardi  
**Sekretaris Redaksi:** Teguh Nirwahjudi  
**Asisten Kepala Divisi Pemberitaan:** Abdul Kohar, Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing  
**Asisten Kepala Divisi Foto:** Haryanto

**Redaktur:** Agus Mulyawan, Agus Wahyu Kristianto, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihanto, Fitriana Siregar, Gantyo Koespradono, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Lintang Rowe, Mathias S. Brahmata, Mochamad Anwar Surachman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistic-jono

**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Purno, Anton Kustedia, Aries Wijaksana, Asep Toha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Clara Rondonuwu, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dimny Mutiara, Dwi Tupani Gunawati, Edwin Tirani, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugrah, Fardiansah Noor, Gino F. Hadi, Handi Andrian, Hani Rahayu, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iis Zatrika, Intan Juita, Irana Shalindra, Ivan Sihombing, Jajang Sumantri, Jerome Eugene, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnu Broto, Kennorton Hutasoat, M. Soleh, Maya Puspiatari, Mirza Ramdani, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Raja Suhud V.H.M. Ramdani, Ratna Nuraini, Rina Garmina, Ririn Radiawati Kusuma, Rini Widuri Ragillia, Rommy Pujiarto, Selamat Saragih, Sica Harum, Sidiq Pramono, Stewartini Suryandari, Sitriah Hamid, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thelati Yani, Tutus Subronto, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum

**Biro Redaksi:** Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parullian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

**MICOM**  
**Asisten Kepala Divisi:** Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan  
**Asisten Kepala Divisi:** Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso  
**Staf:** Abadi Surono, Abdul Salam, Afiani T. Wijaksana, Charles Silaban, M. Syaifulhah, Nurtjahyadi, Panji Arimurti, Prita Daneswari, Rani Nuraini, Ricky Julian, Widjokongko, Wisnu Arto Subari.

**PUBLISHING**  
**Asisten Kepala Divisi:** Jessica Huwae  
**Staf:** Adeste Adipriyanti, Regina Panontongan, Sem Sahala Purba

**CONTENT ENRICHMENT**  
**Asisten Kepala Divisi:** Yohanes S. Widada  
**Periset:** Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Radi Negara  
**Bahasa:** Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

**ARTISTIK**  
**Redaktur:** Diana Kusnati, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi  
**Staf Redaksi:** Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Annette Natalia, Bayu Wicaksono, Budi Haryanto, Budi Setyo Widodo, Dharma Soleh, Donatus Ola Peranda, Endang Mawardi, Gugun Permana, Hari Syahrir, Haryadi, Marionsandez G. M. Rusli, Muhammad Nasir, Muhammad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkiana Ismono, Permana, Tutik Sunarsih, Wanta Santosa, Winston King  
**Manager Produksi:** Bambang Sumarsono  
**Deputi Manager Produksi:** Asnan

**Direktur Pengembangan Bisnis:** Alexander Stefanus  
**Kepala Divisi Marketing Communication:** Fitriana Saiful Bachri  
**Asisten Kepala Divisi Iklan:** Gustaf Bernhard R  
**Asisten Kepala Divisi Marketing Support & Publishing:** Andreas Sujijono  
**Asisten Kepala Divisi Sirkulasi-Distribusi:** Tweki Triandianto  
**Perwakilan Bandung:** Aji Sukaryo (022) 4210500; Medan: A Masduki Kadro (061) 4514945; Padang: Yondri (0751) 811464; Pekanbaru: Ferry Mustanto (0761) 856647; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Bogor: Arief Ibnu (0251) 8349985; Denpasar: Pieter Sahertian (0361) 239210, Lampung: Muharis (0721) 773888; Semarang: Desijhon (024) 7461524; Yogyakarta: Andi

Yudhanto (0274) 7497289; Palembang: Andi Hendriansyah (0711)317526.

**Telepon/Fax Layanan Pembaca:** (021) 5821303. **Telepon/Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113. **Telepon Sirkulasi:** (021) 5812095. **Telepon Distribusi:** (021) 5812077. **Telepon Perencanaan:** (021) 5812086. **Jawa Langganan:** Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim. **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014. **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama. Jakarta. **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520. **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812102, 5812105 (Redaksi) **e-mail:** [redaksi@mediaindonesia.com](mailto:redaksi@mediaindonesia.com). **Perencanaan:** Media Indonesia, Jakarta. **ISSN:** 0215-4935. **Website:** [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com).

**DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARHU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DE-NGAN ALASAN APA PUN**